

Etika Berbangsa dalam Konteks Religius

Mohammad Fajrul Falaakh

Popularitas kata kebangsaan tampak pada perbincangan terhadapnya di berbagai lapisan masyarakat dan dalam berbagai bentuk. Wajar, sebab tahun-tahun belakangan merupakan saat penting bagi mekanisme rekayasa berbangsa di Indonesia. Isyarat untuk itu terlihat pada upaya untuk menuntaskan integrasi bangsa. Menurut logika yang berkembang, ketuntasan integrasi bangsa akan sangat menompang usaha meletakkan kerangka landasan pada saat tinggal landas pembangunan dilaksanakan. Dari sini diharap agar percepatan pembangunan tidak menghadapi hambatan yang berarti. Namun akan sangat gegabah menjadikan integrasi tersebut sebagai satu-satunya prasyarat tinggal landas pembangunan. Tentu saja, sebab aspek keadilan sosial, misalnya, tak kalah penting untuk dicermati. Di banyak belahan dunia tak jarang timbul gejolak dan revolusi sosial akibat ketidakberesan aspek keadilan sosial. Layak pula diingat, integrasi bangsa sendiri akan masih sulit berlangsung jika kedewasaan sikap etis dalam berbangsa tidak berkembang.

Kebangsaan juga disorot seiring dengan menguatnya faham tersebut setelah tampak kesurutannya pada tridasawarsa terakhir. Seperti diketahui, faham kebangsaan di Indonesia muncul akibat pengaruh gerakan nasionalisme maka faham kebangsaan di Indonesia telah melalui proses panjang dan penuh dinamika. Terhadapnya telah berlangsung penguatan, pengujian, reduksi, penyempitan dan keterbukaan, untuk akhirnya mengalami pasang naik.

Proses Membangsa

Penulisan sejarah Indonesia mengenal kehadiran Budi Utomo tahun 1908 sebagai titik kebangkitan bangsa, dengan organisasi tersebut memulai memperjuangkan negara kebangsaan Jawa. Di lain pihak diketahui pula munculnya embrio gerakan kebangsaan dari gerakan keislaman dan ditandai oleh kehadiran Sarekat Dagang Islam yang beraksen ekonomis. Namun jelas bahwa keduanya memang menentang penjajahan –ekonomis, kultural dan politis dan demikian berpihak kepada bangsa sendiri. Dari sini formulasi gerakan keindonesiaan berproses menuju kejelasan.

Jika penentangan gerakan keislaman terhadap kolonialisme direntang maka akan tertampakkan bahwa andilnya bagi tegaknya negara bangsa Indonesia sangat nyata. Seperti di antara lain dikemukakan oleh Raffles dan Antony Reid, ulama (dan umat) selalu didapati dalam setiap penentangan dan pemberontakan terhadap penjajah dan mereka berjuang sangat aktif, sebab kehadirannya terpanggil oleh ajaran Islam yang mewajibkan penganutnya menjadi prajurit agama. Dari penentangan semacam itu gerakan kebangsaan umat berlanjut hingga bermuara pada tujuannya yaitu kemerdekaan Indonesia. Ketika negara masih berusia muda umat Islam pun mempertahankan secara gigih. Memang didapati beberapa contoh negatif tapi tidak dapat menghapuskan arus utama gerakan umat seperti *Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama*, Oktober 1945 (lihat artikel penulis, KR 26 Oktober 1984). Juga kesiapsiagaan melalui *Muktamar Umat Islam Indonesia* di Yogyakarta bulan November 1945 dan lain-lain bukti yang terlalu panjang bisa dideret.

Pendek kata Islam dan umatnya memang memberi sumbangan terhadap, dan bagian sangat penting dalam, usaha mendirikan negara bangsa Indonesia. Hal ini telah dimungkinkan karena terserapnya ajaran Islam secara damai sebagai agama mayoritas rakyat. Karenanya wajarlah jika rakyat menentang kolonialisme Barat yang juga memaksakan agamanya. Donald Eugene Smith menyebut penerimaan Islam sebagai lambang nasional dan faktor pemersatu. Itu sebabnya Ki Hajar Dewantara menyatakan pula, Islam bagi rakyat berarti anti penjajah dan Islam identik dengan tanah-air. Inilah keberhasilan ajaran *man tasabbaha biqoumin fa huwa minhum* (siapa yang mengidentifikasi diri dengan satu golongan maka termasuk dalam golongan tersebut) dan *Hubb al wathon min al iman* (cinta tanah air merupakan bagian iman).

Pilihan membangsa untuk kemudian mendirikan negara-bangsa yang melibatkan diri dalam pergaulan antar bangsa secara moderen tentulah bukan pekerjaan mudah, sama tidak mudahnya ketika proses itu sendiri ditempuh. Sebab pilihan kebangsaan Indonesia berlatarbelakang keanekaragaman ideologis, rasial, etnis, kedaerahan, status sosial dan ekonomi serta agama. Dengan demikian berbangsa Indonesia mengandung penyerasian hubungan diantara keanekaragaman tersebut. Fahaman kebangsaan ini tampak menguat dan diharap makin menguat setelah meredup kebersamaan pernyataan matinya ideologi. Reideologi kebangsaan muncul ketika penyelesaian banyak masalah kompleks dalam pembangunan, yang ditangani secara teknis-teknokratis semata, mengalami kejenuhan, seiring dengannya di berbagai belahan dunia muncul pula, misalnya, reideologisasi keagamaan (Islam di Iran, Katolik di Amerika Latin dan baru-baru ini berpengaruh kuat di Philipina) atau pengagungan masa lampau bangsa (seperti Aryanisme yang gagal melalui Nazi-Hitler dan Shah Iran). Juga komunalisme (yang belum 'berhasil' pada gerakan Sikh di India atau yang menggejala pada kalangan Tamil di Srilangka) maupun bentuk lain atas dasar keadikuasaan terhadap masa depan dan kuasa militer yang disimbulkan melalui *Rocky*, *Rambo* dan *Star Wars* di Amerika. Ideologi, memang, tampak menjanjikan gilang masa depan gemilang.

Kebangsaan Sebagai Kesepakatan

Di tengah keaneragaman latar belakang telah dicapai kesepakatan untuk memilih Indonesia sebagai bangsa. Ini merujuk pada konsep *nation* seperti dikemukakan Ernest Renan. Menurutnya, *nation* adalah suatu solidaritas besar dan terwujud oleh perasaan-perasaan subyektif yang disebabkan oleh pengorbanan yang telah diberikan lagi pada masa depan. Suatu *nation* memiliki masalah tapi meneruskan diri dalam kekinian dengan satu fakta tegas; kesepakatan, yang berupa pernyataan kehendak secara jelas untuk meneruskan hidup bersama-sama. Ini mengisyaratkan keniscayaan, bahwa cita-cita dan kepentingan bersama akan dapat dicapai melalui dan dalam ketergabungan diri sebagai bangsa. Karena itulah Mohammad Yamin mengajukan sebutan *gentlemen agreement* (semacam janji luhur para kesatria) bagi kesepakatan para pemimpin pergerakan nasional sekitar tahun 1945.

Untuk kaitan ini Ibnu Khaldun (1332-1406 M) layak dikemukakan. Dikatakannya bahwa suatu negara berdiri karena adanya suatu bangsa yang berdaulat, yaitu sekumpulan orang yang memiliki *al ashabiyah wa al syaukah* (harfiah: rasa golongan dan kuasa). Di dalamnya terkandung adanya

subyektifitas psikologis manusia-manusia yang membangsa dan adanya kekuasaan atau kedaulatan terhadap diri sendiri, penggolongan diri seperti itu dimungkinkan karena manusia memiliki *fikrah* (kesanggupan fikir) dan *siyasah* (politik), jadi, *homo politikus* yaitu mahluk yang mempunyai kemampuan berfikir dan berusaha mencapai tujuan-tujuannya. Mereka meniscayakan diri dalam usaha pengorganisasian dan pengelolaan kerjasama untuk memakmurkan bumi. Bagi Imam Ghazali (1058-1111 M) kesepakatan seperti itu, atau kontrak sosial untuk bernegara, merupakan wujud dari semangat saling tergantung dikalangan anggota masyarakat. Dalam kaitan ini dapat pulalah pernyataan Bung Hatta difahami, bahwa yang diinginkanya adalah *kebangsaan rakyat*. Sebab dengan semangat dan kedaulatan rakyat itulah suatu bangsa mengalami pasang naik dan pasang surut derajatnya.

Pada akhirnya Hans Kohn menyebutkan, bahwa yang terpenting ialah kemauan bersama yang hidup nyata untuk mendirikan dan terlibat dalam suatu negara-bangsa. Inilah yang dipilih di Indonesia, di tengah anekaragam pengelompokan yang didasarkan hubungan kekerabatan, kebudayaan tradisional, kolektifitas sosial atas dasar pendidikan modern, pekerjaan, kedaerahan, solidaritas rasial, agama dan lain-lain.

Islam dan Kebangsaan

Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap kebangsaan perlulah diperhatikan, bahwa Allah telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan dan dijadikan-Nya manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal (QS *Al Hujarat: 13*). Ayat ini menunjukkan perlunya saling komunikasi antar manusia, antar suku, antar bangsa sehingga interaksi yang bermakna dan bermartabat dapat dihasilkan serta agar tidak ribut-ribut dan justru merenggang keanekaragaman (termasuk keanekaan bangsa). Lebih-lebih, jika Allah menghendaki tentulah manusia akan dijadikan satu bangsa namun justru manusialah yang senantiasa berselisih pendapat (QS *Hud: 118*).

Dalam Al-Qur'an memang banyak kali kata bangsa disebut. Ini dipadankan dari kata *ummatan*. Menurut telaah Qomaruddin Khan, misalnya, kata umat tersebut digunakan dalam beberapa pengertian konsepsional. *Pertama*, untuk menyebut pengertian nasion tanpa kualifikasi tertentu. *Kedua*, digunakan bagi pengertian sekelompok orang. *Ketiga*, mengandung pula pengertian agama (religion). *Keempat*, berarti periode waktu. *Kelima*, mengandung pengertian ganda (pertama dan ketiga) yaitu masyarakat keagamaan. Dalam pengertian terakhir itulah para pengikut Nabi Muhammad hingga akhir zaman disebut umat.

Mengikuti Nabi Muhammad berarti berhubungan pula dengan non-muslim. Salah satu fakta sejarah hubungan Nabi Muhammad dengan kalangan non-muslim dapat dikaji dari *Perjanjian Madinah (Mitsaq al Madinah)* yang di kalangan para pengkaji politik umat Islam dikenal dengan sebutan *Konstitusi/Piagam Madinah*. Klasifikasi sederhana terhadap 47 pasal perjanjian tersebut menunjukkan hal-hal berikut. *Pertama*, pendukung perjanjian tersebut terdiri dari anekaragam golongan dari segi turunan, budaya dan agama tapi disatukan oleh kesepakatan dan kepentingan politik bersama (terjadi aliansi politik) untuk mengembangkan kehidupan bersama. Dilihat dari muslim dan non-

muslim maka diberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan orang-orang non-muslim untuk menjalankan ibadah agamanya. *Kedua*, semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas, memiliki hak dan kewajiban yang sama dan wajib saling bantu serta tak boleh seorangpun diperlakukan secara buruk, bahkan orang lemah harus dilindungi dan dibantu. *Ketiga*, hukum adat (kebiasaan masa lalu) tetap berlaku dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan siapapun tak boleh melindungi apalagi berpihak kepada kejahatan. *Keempat*, hak setiap orang harus dihormati dan hak milik individu diakui. *Kelima*, usaha mencapai perdamaian sebagai tujuan utama dilakukan dengan tanpa mengorbankan keadilan dan kebenaran.

Etika Berbangsa

Telah jelaslah pelajaran bagi saling memperlakukan secara etis dalam masyarakat majemuk. Di Indonesia sendiri telah dilakukan penilaian terhadap faham kebangsaan dan konstitusi negara dengan ajaran Islam. Lagi pula, sebagai perjanjian luhur berbangsa mestilah ia tepati. Umat Islam mestilah mengembangkan sikap etis, berbuat baik dan adil, terhadap penganut agama lain yang tidak memusuhi karena agama Islam yang dianut dan tidak mengusir dari negeri (QS Al Mumtahanah: 8).

Pendeknya etika religius dalam berbangsa, yaitu berhubungan dengan berbagai golongan dalam masyarakat majemuk, selayaknya dipancarkan. Jika etik tersebut, seperti yang telah diurai panjang di muka, berkembang maka dapatlah diharap sumbangannya bagi usaha memajukan kesejahteraan bersama. Sebab di tengah iklim yang dilandasi etik, dan wawasan, keagamaan tersebut tentulah dapat dilakukan rekayasa masadepan rakyat yang makin menghadapi persoalan-persoalan rumit dan memerlukan ketenangan, kesetiakawanan serta kerjasama. Keluhuran gerak operasional dan aktualisasi diri suatu bangsa memang ditentukan oleh etik yang menyinari dan dikembangkan dalam kehidupan. Sesuatu yang tak etis tak layak dijadikan ancaman mengembangkan norma, program, sikap dan perilaku bersama. (Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, 23/5/1986)